

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kebijakan Trump yang bernuansa ‘America First’ menuntut Amerika untuk selalu menjadi yang terdepan dalam berbagai sektor, salah satunya dalam sektor keantariksaan. Jika melihat kecenderungan Trump, memang pada dasarnya Trump sangat menekankan doktrin ‘America First’, sehingga tak heran jika di sini dalam sektor keantariksaan pun Trump merasa perlu bagi Amerika Serikat untuk menjadi yang terdepan. Dalam National Security Strategy of the United States of America yang ditandatangani oleh Trump pada Desember 2017 lalu, dalam segmen *Introduction* tertulis dengan gamblang bahwasanya National Security Strategy menempatkan Amerika Serikat di posisi pertama, yang lebih jauh menjadi wujud konkret idealisme “American First” yang diusung oleh Trump. Hal ini diperkuat oleh ambisi pemerintahan Trump untuk kembali mengirim pesawat berawak ke Bulan, setelah misi terakhir Apollo 17 pada Desember 1972, yang menjadi misi terakhir pendaratan manusia di Bulan.

Bahkan, demi mendukung ambisinya ini, Trump merencanakan untuk merilis cabang baru dalam angkatan bersenjata Amerika Serikat, yakni angkatan bersenjata keantariksaan (*space force*). Pada 18 Juni 2018 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan pembentukan United States Space Force dalam rangka memperkuat armada Amerika Serikat di bidang keantariksaan. Pengajuan pembentukan United States Space Force disini diiringi oleh pernyataan Trump yang mengatakan bahwasanya,

“When it comes to defending America, it is not enough to merely have an American presence in space. We must have American dominance in space—it’s so important.”

Meskipun pembentukan United States Space Force sendiri belum mengantongi persetujuan dari Kongres, akan tetapi pengajuan dari United States Space Force

sendiri sudah dapat dijadikan indikator dari seberapa pentingnya keantariksaan bagi pemerintahan Trump. Jika melihat Outer Space Treaty 1967, negara-negara yang memiliki kapabilitas di sektor keantariksaan memang dilarang keras untuk menggunakan atau bahkan sekadar melakukan instalasi senjata penghancur massal di luar angkasa, namun tidak ada segmen khusus yang melarang suatu negara untuk mengembangkan senjata konvensional atau bahkan membicarakan mengenai penghancuran satelit, terutama dengan mulai dikembangkannya ASAT atau senjata anti-satelit yang sempat diuji coba oleh Tiongkok pada tahun 2007 lalu.

Ditinjau dari pidato yang disampaikan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence di Pentagon pada 9 Agustus 2018 lalu, setelah peluncuran *review* Department of Defense yang dipimpin oleh Trump, di mana Trump menyatakan bahwasanya perlu untuk merilis cabang baru dalam angkatan bersenjata Amerika Serikat, yakni angkatan bersenjata keantariksaan (*space force*). Pidato yang disampaikan oleh Pence ini hanya terpaut beberapa hari setelah Tiongkok mengumumkan klaim bahwa negaranya berhasil melakukan pengujian alat hipersonik.

Astropolitik menjadi suatu gagasan yang semakin krusial, lantaran Tiongkok saat ini tengah mengalami peningkatan dalam sektor kegiatan keantariksaan. Idealisme Trump memicu pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya untuk memberikan respon, meskipun respon yang diberikan oleh Amerika Serikat seringkali tidak secara terang-terangan dan masih mengacu pada sikap *deterrence*. Sikap tersebut tidak menghentikan Amerika Serikat untuk selalu mengecam kegiatan keantariksaan Tiongkok atas dasar kekhawatiran bahwasanya Tiongkok berupaya untuk mengembangkan senjata anti-satelit yang selanjutnya bisa digunakan untuk menyerang satelit negara lain.

Sikap paranoid pemerintah Amerika Serikat ini sebenarnya bukanlah hal baru. Semenjak tahun 2011, Kongres Amerika Serikat telah melarang NASA untuk melakukan kerja sama dengan CNSA atas dasar alasan bahwa Tiongkok

melakukan pelanggaran Intellectual Property Rights dan di saat bersamaan melakukan espionase terhadap perkembangan kegiatan keantariksaan Amerika Serikat. Memang beberapa tahun terakhir, Tiongkok dapat dikatakan mengalami kemajuan pesat terutama di sektor keantariksaan. Salah satu pencapaian terbesar Tiongkok yang kemudian menjadi awal kecemasan Amerika Serikat adalah ketika Tiongkok berhasil melakukan uji coba ASAT atau senjata anti-satelit pada tahun 2007. Meskipun uji coba kedua dan ketiga yang mengikuti uji coba pertama tadi dinyatakan tidak berhasil, akan tetapi keberhasilan uji coba pertama menimbulkan kekhawatiran sendiri terutama terkait isu keamanan, di mana ancaman ASAT untuk pertama kalinya menjadi suatu ancaman yang tidak lagi bersifat angan-angan, namun semakin konkret. Kedua ialah pembangunan *space station* Tiongkok di Argentina. Proyek ini berawal dari perjanjian antara Xi Jinping selaku Presiden Tiongkok dengan Presiden Argentina terdahulu, yakni Cristina Fernández de Kirchner. Perjanjian ini diratifikasi pada tahun 2015 dan semenjak tahun 2016, pembangunan *space station* telah berjalan. Menginjak tahun 2017, *space station* Tiongkok di Argentina resmi diinaugurasi.

Pembangunan *space station* ini memang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemajuan teknologi keantariksaan yang telah dimiliki Amerika Serikat, akan tetapi pembangunan sekaligus pengoperasian dari *space station* ini menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat karena (1) lokasi pembangunan *space station* ini secara geografis dekat dengan Amerika Serikat, (2) dan kerja sama Tiongkok-Argentina kemudian menjadi indikasi pengaruh Tiongkok yang merambah hingga Amerika Selatan, dan (3) Pentagon berulang kali mencurigai bahwa pengoperasian *space station* sebenarnya lebih dilatarbelakangi oleh motivasi militer dibandingkan upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi semata. Kemudian, perkembangan pesat yang paling baru dari CNSA, yang bahkan sampai saat ini masih tidak termasuk dalam ISS, ialah keberhasilan Tiongkok menjadi negara ketiga yang mendaratkan manusia ke bulan. Bahkan, Tiongkok dan Rusia pada tahun 2018 lalu telah menandatangani *Memorandum of Understanding* yang meliputi *joint venture* antara Roscosmos

dengan CNSA untuk melakukan eksplorasi di wilayah Bulan yang belum terjamah oleh ISS. Dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Tiongkok, didukung oleh kerja sama antara Tiongkok dengan Rusia, pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump mempersepsikan luar angkasa sebagai salah satu domain peperangan seperti halnya udara, air, dan laut.

“Space and cyberspace as warfighting domains. The Department will prioritize investments in resilience, reconstitution, and operations to assure our space capabilities. We will also invest in cyber defense, resilience, and the continued integration of cyber capabilities into the full spectrum of military operations.”

Berangkat dari asumsi pengambil kebijakan yang mengkategorikan luar angkasa sebagai arena perang, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump sebenarnya memiliki dasar kebijakan yang jelas untuk kemudian melakukan investasi besar-besaran di sektor keantariksaan, yang mampu mempersiapkan kapabilitas Amerika Serikat di bidang pertahanan keantariksaan. Asumsi ini diikuti oleh penolakan Amerika Serikat untuk melakukan kerja sama bilateral antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Momentum tersebut kemudian menjadi indikasi bahwasanya perkembangan astropolitik Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan astropolitik di negara-negara besar lainnya, yang sekaligus mendorong persepsi pengambil keputusan Amerika Serikat bahwasanya sektor astropolitik memiliki urgensi tersendiri terutama terkait keamanan nasional, sehingga disini dirasa perlu bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai implikasi tren yang sedang berlangsung terhadap kebijakan pertahanan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengajukan pertanyaan, terkait perkembangan astropolitik yang melibatkan negara-negara besar seperti Rusia dan

Tiongkok, apakah implikasi tren yang sedang berlangsung terhadap kebijakan pertahanan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan astropolitik di negara-negara besar seperti Rusia dan Tiongkok memiliki peranan tersendiri dalam memengaruhi keputusan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat, terutama di sektor pertahanan. Secara lebih lanjut, penelitian ini menguraikan implikasi apa saja dari tren perkembangan astropolitik di negara-negara besar tersebut terhadap bagaimana kebijakan pertahanan Amerika Serikat terbentuk, khususnya di era kepemimpinan Trump yang memiliki perhatian lebih di sektor kegiatan keantariksaan.

### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Dalam menyusun kerangka pemikiran, peneliti mengacu pada studi-studi terdahulu yang membahas mengenai tren perkembangan astropolitik di negara-negara besar seperti Tiongkok dan Rusia implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Selama ini, relasi Amerika Serikat dengan salah satu negara besar, yakni Tiongkok, sarat oleh ketidakpercayaan antara satu sama lain. Dengan adanya peningkatan kegiatan keantariksaan Tiongkok, justru meningkatkan rasa curiga di antara keduanya. Berawal dari pemerintahan Obama, melalui pembentukan National Space Policy 2010, Hilborne (2013) berargumen bahwasanya Amerika Serikat telah menunjukkan keengganan untuk melakukan negosiasi dengan Tiongkok terkait kegiatan keantariksaan dan bersikap pasif agresif mengenai implementasi astropolitiknya lantaran kebijakan yang terbentuk mengesankan bahwasanya Amerika Serikat cenderung bersikap terbuka pada kemungkinan eskalasi dari militerisasi menjadi upaya mempersenjatai luar angkasa.

Serupa dengan argumen Hilborne, Blazejewski (2008) melihat bahwasanya kebijakan Amerika Serikat terkait upaya mempersenjatai keantariksaan sejak jauh sebelum pemerintahan Obama cenderung kontradiktif dan tidak jelas, melalui pemberian ruang pada opsi upaya mempersenjatai luar angkasa. Kemudian, seiring dengan tren perkembangan astropolitik di negara-negara besar lainnya, terutama dalam konteks pesaing Amerika Serikat, yakni Tiongkok, mendorong Amerika Serikat untuk menjadi lebih hati-hati (*risk-averse*) dalam menentukan kebijakan luar negerinya, yang seringkali diwujudkan melalui mekanisme defensif yang memungkinkan Amerika Serikat meluncurkan senjata sebagai serangan pertahanan. Dari mekanisme tersebut, Blazejewski merekomendasikan kebijakan pertahanan Amerika Serikat yang menjustifikasi penggunaan senjata di sektor keantariksaan, yang meliputi tiga elemen, yakni (1) perlindungan aset keantariksaan Amerika Serikat, (2) pertahanan misil balistik, dan (3) kontrol atas luar angkasa.

Dalam studi lain, Su (2010) melihat relasi antara negara-negara besar seperti Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat dalam konteks astropolitik. Dari relasi ketiganya, Su meneliti pengajuan perjanjian multilateral oleh Tiongkok dan Rusia dalam mencegah upaya mempersenjatai luar angkasa. Dari penelitian tersebut, Su menyimpulkan respon Amerika Serikat ketika masih berada di bawah pemerintahan Obama, adalah bahwasanya Amerika Serikat menentang segala bentuk upaya mempersenjatai luar angkasa, dan oleh karenanya pengadaan perjanjian multilateral menjadi suatu medium bagi Amerika Serikat untuk mengambil peranan sebagai pemimpin dalam konteks astropolitik.

Dari studi-studi tersebut, para akademisi menunjukkan bagaimana Amerika Serikat selalu mempersepsikan diri sebagai negara dengan perkembangan paling pesat di sektor keantariksaan, yang lebih lanjut menunjukkan persepsi pengambil keputusan bahwasanya Amerika Serikat berada pada posisi yang diuntungkan oleh *status quo*. Persepsi demikian mendorong Amerika Serikat untuk membentuk kebijakan luar negeri yang cenderung *risk-averse*, yang menentang upaya

mempersenjатаi sektor keantariksaan namun secara bersamaan juga meninggalkan celah bagi kemungkinan untuk meluncurkan senjata balasan sewaktu-waktu terjadi serangan. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga seringkali melakukan kerja sama multilateral di sektor keantariksaan dengan persepsi bahwa Amerika Serikat merupakan negara pelopor di sektor keantariksaan. Dengan berpegang pada studi yang telah ada, dalam konteks penelitian yang dilakukan oleh peneliti di sini, peneliti secara spesifik melihat bagaimana implikasi dari tren perkembangan astropolitik di negara-negara pesaingnya seperti Tiongkok dan Rusia terhadap kebijakan pertahanan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump, terutama jika dilihat dari tiga elemen yang sebelumnya disampaikan oleh Blazjewski, yang meliputi perlindungan aset keantariksaan Amerika Serikat, pertahanan misil balistik, dan kontrol atas luar angkasa dilihat dari respon Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump terhadap upaya kerja sama multilateral di sektor keantariksaan.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Untuk mencari tahu implikasi tren yang sedang berlangsung terhadap kebijakan pertahanan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump, peneliti berangkat dari kerangka pemikiran bahwasanya kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh bagaimana elit mempersepsikan perkembangan lingkungan internasional dan perilaku aktor lain.

### **1.5.1 Pengaruh Persepsi Elit terhadap Kebijakan Luar Negeri**

Pemikiran ini berakar bukan pada konsep dalam studi hubungan internasional dan dapat ditelusuri jauh sebelum studi behavioralisme, yakni pada konsep Gestalt dalam psikologi. Konsep Gestalt menyatakan bahwasanya suatu pemicu dapat diinterpretasikan melalui dua cara, seperti dalam konteks sebuah gelas berisi air yang bisa dimaknai sebagai setengah penuh atau setengah kosong, yang kemudian menjadi ilustrasi bagaimana persepsi menentukan bagaimana citra dibentuk. Jika

diaplikasikan pada konsep persepsi dalam konteks persepsi elit, maka perkembangan lingkungan internasional dan perilaku aktor lain di sini memiliki makna yang berbeda, bergantung pada siapa elit yang menginterpretasikannya. Bertolak dari hipotesis yang disampaikan oleh Jervis (1968) bahwasanya pembuat keputusan cenderung untuk mencocokkan informasi yang mereka terima dengan teori dan citra yang mereka ketahui, atau dengan kata lain, pembuat keputusan cenderung untuk membentuk persepsi yang disesuaikan dengan prediksi yang mereka buat. Salah satu faktor yang mendorong sikap demikian adalah pengalaman dari peristiwa yang telah ada. Selama ini, Rusia dan Tiongkok seringkali dilihat sebagai ancaman terbesar terhadap legitimasi politik Amerika Serikat dalam konstelasi perpolitikan internasional. Ketika Uni Soviet masih berdiri, Amerika Serikat sempat terlibat Perang Dingin dan meskipun Amerika Serikat keluar sebagai aktor dominan dalam hubungan internasional pasca perang, hal tersebut tidak menghentikan Amerika Serikat untuk tetap memandang Rusia sebagai rival. Kemudian dengan Tiongkok, di mana secara kekuatan ekonomi Tiongkok telah berhasil secara perlahan menyusul Amerika Serikat. Kemudian dalam konteks perkembangan astropolitik di kalangan negara-negara besar, seperti Rusia dan Tiongkok, kedua negara tersebut telah berhasil mengembangkan kemajuan teknologi keantariksaan mereka di saat bersamaan kedua negara tersebut mulai melakukan kerja sama. Meskipun kemajuan yang dialami oleh Rusia dan Tiongkok masih dianggap jauh dari kemungkinan untuk kedua negara memegang dominasi di sektor tersebut, Amerika Serikat mempersepsikan Rusia dan Tiongkok sebagai ancaman terhadap pertahanannya di sektor keantariksaan. Secara konsep, pemimpin politik yang merasa curiga atas keamanan negaranya dan memosisikan keamanan negara dalam keadaan terancam memiliki kecenderungan untuk meningkatkan kapabilitas militernya (Morin & Paquin, 2018: 87). Oleh karena itu, tak heran jika persepsi yang kemudian terbentuk di kalangan pembuat keputusan Amerika Serikat terkait tren perkembangan astropolitik di negara-negara besar mengambil corak yang sama, yakni bahwasanya pertahanan Amerika Serikat di sektor keantariksaan terancam oleh

perkembangan astropolitik yang juga ikut menjadi perhatian negara-negara besar seperti Tiongkok dan Rusia dan implikasi yang muncul di sini adalah pembuat keputusan di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump cenderung untuk meningkatkan kapabilitas militer, yang dapat diwujudkan melalui mekanisme kebijakan pertahanan yang memadai.

### **1.5.2 Pengaruh Faktor Prospek terhadap Persepsi Pembuat Keputusan**

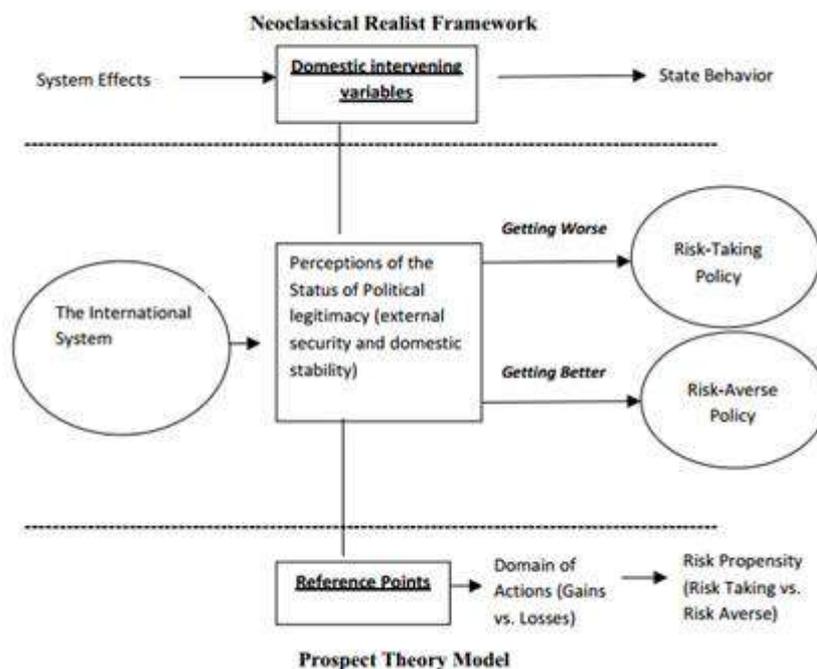
Peneliti telah menyinggung bagaimana persepsi pembuat keputusan seringkali disesuaikan dengan prediksi pembuat keputusan mengenai suatu peristiwa, yang kemudian menjadi indikasi bahwasanya persepsi pembuat keputusan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengambil keputusan memandang prospek dari ketika suatu kebijakan diberlakukan. Untuk menjelaskan bagaimana faktor prospek berpengaruh terhadap persepsi pembuat keputusan, peneliti menggunakan *prospect theory* seperti yang diuraikan oleh He & Feng (2013: 4).

Dalam menyusun suatu kebijakan, para pengambil keputusan cenderung untuk berpaku pada satu poin referensi, yang mana secara umum, poin referensi yang digunakan adalah status quo (He & Feng, 2013: 4). Jika status quo menempatkan negara dalam posisi yang tidak menguntungkan dan berpotensi mengalami kekalahan, maka pengambil keputusan cenderung untuk mengambil keputusan yang sifatnya berisiko. Sebaliknya, jika status quo menempatkan negara pada posisi yang menguntungkan, yang memungkinkan negara untuk berada di posisi superior, maka pengambil keputusan cenderung berhati-hati dalam menyusun suatu kebijakan. Dalam konteks negara besar, yang mana di sini adalah Amerika Serikat, pembuat keputusan cenderung memposisikan negara mereka dalam posisi yang berpotensi mengalami kekalahan.

“He suggests that policy makers of great powers are more likely to choose risky diplomatic and political intervention strategies when they are faced with perceived losses—in terms of relative power and status, i.e., when they are framed in a domain of losses.” (Taliaferro, 2004; He & Feng, 2013: 5)

Hal ini sejalan dengan model legitimasi politik yang mengilustrasikan bagaimana dalam membuat suatu kebijakan, pengambil keputusan menelaah opsi-opsi yang mereka miliki berdasarkan persepsi mereka atas status quo dari legitimasi politik domestik dan internasional yang mereka miliki dalam konteks sistem internasional (He & Feng, 2013: 10-1). Oleh karena itu, dengan persepsi bahwa status quo saat ini mengancam legitimasi politik Amerika Serikat di ranah internasional, pengambil keputusan kemudian berupaya untuk menyusun kebijakan yang mampu menentang status quo. Skema berikut menggambarkan bagaimana *prospect theory* dengan model legitimasi politik ini diaplikasikan.

**Grafik 1.1 Kerangka *Prospect Theory***



*Sumber: He & Feng 2013*

Jika kerangka pemikiran yang terkandung dalam bagan di atas diaplikasikan pada penelitian mengenai implikasi tren terkait perkembangan astropolitik di negara-negara besar, seperti Tiongkok dan Rusia, terhadap kebijakan pertahanan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump, maka model yang kemudian muncul dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Dalam menyusun suatu kebijakan, pengambil keputusan di bawah kepemimpinan Trump memetakan terlebih dahulu persepsi mereka mengenai legitimasi politik Amerika Serikat, baik secara domestik maupun dalam lingkup sistem internasional. Dalam pemetaan persepsi ini, pembuat keputusan mempertimbangkan prospek dari legitimasi politik Amerika Serikat. Karena prospek yang dilihat adalah bahwasanya Amerika Serikat akan sepenuhnya kehilangan legitimasi politik di sektor keantariksaan lantaran tersaingi oleh negara-negara besar seperti Tiongkok dan Rusia, maka tak heran jika persepsi pembuat keputusan Amerika Serikat di sini cenderung paranoid terhadap negara-negara besar tadi, serta menjadi indikasi bahwasanya Amerika Serikat memposisikan legitimasi politiknya dalam sistem internasional tengah berada di bawah ancaman.

Jika kemudian ditarik benang merah antara kedua faktor tersebut, maka di sini peneliti menduga bahwasanya implikasi tren terkait perkembangan astropolitik di negara-negara besar, seperti Tiongkok dan Rusia, terhadap kebijakan pertahanan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump, ialah perkembangan astropolitik negara-negara besar tadi membawa prospek yang kurang menguntungkan bagi Amerika Serikat, sehingga persepsi yang muncul ialah Amerika Serikat berada pada posisi yang terancam dalam sektor keamanan di bidang keantariksaan, yang kemudian mendorong pembuat keputusan untuk menyusun kebijakan pertahanan yang cenderung berisiko, dengan *status quo* yang mana posisi Amerika Serikat masih sebagai negara dengan kegiatan keantariksaan paling maju, sebagai poin referensi bagi pembuat keputusan dalam menyusun kebijakan pertahanan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump. Dugaan peneliti ini bertolak dari ilustrasi bagan di atas dan mengacu kembali pada argumen utama *prospect theory* yang menyatakan bahwasanya status quo seringkali menjadi poin referensi bagi pembuat keputusan dalam menyusun kebijakan. Untuk mendukung dugaan ini, peneliti juga mengacu pada argumen lain mengenai poin referensi dalam *prospect theory* yang dikemukakan oleh Jervis (1989: 30; Levy, 1992: 285) dengan argumen bahwasanya status quo dalam konstelasi politik internasional tidaklah

acak, namun menjadi cerminan dari negara yang telah menempati posisi berpengaruh di sektor yang paling penting bagi negara, yang mana dalam konteks penelitian kali ini ialah sektor keantariksaan.

### 1.5.3 Pengaplikasian Astropolitik

Untuk mencari tahu implikasi tren yang sedang berlangsung terhadap kebijakan pertahanan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump, terkait perkembangan astropolitik yang melibatkan negara-negara besar seperti Rusia dan Tiongkok, peneliti mengacu pada definisi astropolitik oleh Dolman (2002: 13),

“Astropolitik, a term specifically chosen for its negative connotations, is identified as a determinist political theory that manipulates the relationship between state power and outer-space control for the purpose of extending the dominance of a single state over the whole of the Earth. It presumes the state that dominates space is specifically chosen by the rigors of competition as the politically and morally superior nation, culture, and economy.”

Astropolitik menurut Dolman meliputi hubungan antara kekuatan negara di sektor keantariksaan dengan kontrol negara atas luar angkasa, di mana relasi antara dua faktor tadi dimanipulasi demi kepentingan dominasi. Negara yang mendominasi sektor keantariksaan dianggap sebagai negara yang secara moral dan politik superior, mulai dari bangsanya, budayanya, dan perekonomiannya. Setelah Amerika Serikat dinyatakan superior pada Perang Dingin, Amerika Serikat tumbuh menjadi negara hegemon dengan praktik demokrasi paling mumpuni. Budaya populer Amerika Serikat pun mendominasi secara global dan di sektor keantariksaan sendiri, NASA masih menjadi pusat penelitian luar angkasa paling terpercaya dengan kemajuan paling pesat. Secara ekonomi, meskipun Amerika Serikat mulai tersaingi oleh Tiongkok, namun Amerika Serikat masih merupakan negara dengan perekonomian terkuat yang mendukung kemajuan teknologi dan penelitian lebih lanjut di sektor keantariksaan. Tak hanya itu, dalam konteks Amerika Serikat ini, definisi astropolitik yang diajukan oleh Dolman dianggap

sesuai lantaran indikasi bahwasanya persepsi Amerika Serikat terkait astropolitik tidak jauh berbeda dengan definisi astropolitik yang ditawarkan oleh Dolman. Pernyataan Trump yang menguatkan upaya dominasi Amerika Serikat dalam aspek keantariksaan di sini merupakan refleksi dari definisi astropolitik di atas, di mana melalui upaya dominasi sektor keantariksaan, Amerika Serikat juga berupaya untuk mempertahankan posisi negaranya sebagai negara superior di era ini.

### **1.6 Argumentasi Penelitian**

Para elit pembuat kebijakan pertahanan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump mempersepsikan perkembangan astropolitik negara-negara besar seperti Tiongkok dan Rusia sebagai ancaman terhadap pertahanan nasional di sektor keantariksaan. Persepsi ini diperkuat oleh elit pembuat kebijakan Amerika Serikat yang melihat prospek legitimasi politik negara di sektor keantariksaan pada ranah internasional semakin tersaingi oleh negara-negara besar seperti Tiongkok dan Rusia, sehingga berimplikasi terhadap konstruksi kebijakan pertahanan era kepemimpinan Trump yang berorientasi pada militerisasi keantariksaan yang tidak hanya defensif, namun juga berpotensi ofensif sebagai instrumen untuk mengembalikan superioritas Amerika Serikat di ranah internasional melalui perlindungan aset keantariksaan Amerika Serikat, pertahanan misil balistik, dan kontrol atas luar angkasa.

### **1.7 Operasionalisasi Konsep**

Pada sub-bab ini, peneliti mengajukan sebuah konsep, yaitu militerisasi keantariksaan dan luar angkasa.

**1.7.1 Militerisasi Keantariksaan**

Berlawanan dengan asumsi umum, militerisasi keantariksaan tidak serta merta diikuti oleh upaya mempersenjatai luar angkasa. Militerisasi keantariksaan secara sempit dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan luar angkasa sebagai basis pertahanan militer. Adapun militerisasi keantariksaan dapat dikategorikan menjadi dua sistem, yakni sistem *space-based* yang meliputi pangkalan militer di darat, pesawat ulang-alik, hingga Inter-continental Ballistic Missile (ICBM) dan *ground-based* yang mana di dalamnya terdapat sistem pendukung pertahanan dan/atau senjata (Rosas, 1983: 357-8). Kemudian, dua kategori tadi terbagi lagi menjadi dua kategori lain, yakni sistem yang menjadi sarana pendukung dan sistem yang mencakup senjata, seperti yang tercantum pada tabel di bawah.

**Grafik 1.2 Tabel Kategori Sistem Militerisasi Keantariksaan**

Fig. 1.

		space-based	ground-based
‘Aggressive’ nature		reconnaissance, early-warning, wheather and remote sensing satellites	various systems in use by many states
	S	communications, navigation satellites	ground stations
		satellite transport systems with attack capability	ground stations
		anti-satellite systems (ASAT)	US space shuttle
			US Thor (1964-75), US air-based MHIV system (1987 ?)
	W	ballistic missile defence (BMD)	USSR ‘killer’ satellites (tests since 1968), directed-energy weapons(?)
	bombs and missiles targeted on earth		(ICBMS, including FOBS)

S = support systems      W = weapons

Sumber: Rosas (1983: 358)

Jaringan satelit tadi dapat dikatakan sebagai bentuk pasif dari militerisasi keantariksaan yang masih berada pada ranah ‘sistem pendukung’ bagi sektor

militer lain, belum pada taraf dimana pertahanan keantariksaan dikembangkan secara khusus untuk melindungi kemungkinan serangan di orbit terluar bumi. Bentuk pasif militerisasi keantariksaan lebih lanjut diuraikan oleh Steinberg (1982: 379), yang berargumen bahwa militerisasi keantariksaan tidak serta merta berupa pengembangan senjata berbasis luar angkasa untuk melakukan agresi, melainkan teknologi berbasis luar angkasa yang didesain secara khusus untuk meningkatkan sistem militer. Bentuk militerisasi keantariksaan yang pasif ini menjadi elemen penting dalam struktur pertahanan negara-negara besar.

Seiring perkembangan zaman, militerisasi keantariksaan yang berbentuk pasif di sini tidak lagi sekadar berupa komponen dalam mekanisme pertahanan nasional negara-negara besar, namun juga untuk kepentingan *counter-action*. Teknologi berbasis keantariksaan tidak lagi hanya digunakan sebagai pertahanan, namun juga memfasilitasi upaya negara untuk memiliki kapabilitas ofensif, yang mana teknologi berbasis luar angkasa dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan balik seandainya pertahanan nasional mendapat serangan, terlepas dari sektor militer mana yang diserang.

Herbert York (1979; Steinberg, 1982: 383) berargumen bahwasanya pengembangan teknologi dengan kapabilitas defensif dan ofensif seringkali dilakukan bukan untuk tujuan militerisasi, namun lantaran sumber daya yang mendukung perkembangan teknologi telah memadai. Perkembangan teknologi berbasis luar angkasa dengan kapabilitas defensif lantas menandakan signifikansi sektor luar angkasa dalam militer. Kemudian, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, teknologi berbasis luar angkasa kemudian menjadi sarana militerisasi keantariksaan, melalui pengembangan teknologi dengan kapabilitas yang tidak hanya defensif, namun juga berpotensi ofensif. Teknologi berbasis keantariksaan yang tidak hanya bersifat defensif namun juga berpotensi ofensif di sini oleh Steinberg kemudian diklasifikasikan sebagai militerisasi keantariksaan aktif dan meliputi sistem anti-satelit, pertahanan misil

balistik berbasis luar angkasa, dan penggunaan pesawat ulang-alik sebagai sarana untuk pengadaan senjata di luar angkasa.

Militerisasi keantariksaan ini pun tidak serta merta melanggar hukum internasional terkait keterlibatan militer di sektor keantariksaan, karena interpretasi yang beragam mengenai restriksi militerisasi keantariksaan dalam hukum internasional itu sendiri. Dalam hal ini, selama orientasi militerisasi keantariksaan adalah sebagai pertahanan, pencegahan potensi eskalasi konflik, dan tidak ditujukan sebagai agresi, maka militerisasi keantariksaan bukanlah kebijakan pertahanan yang bertentangan dengan hukum internasional maupun perjanjian internasional di sektor keantariksaan. Militerisasi keantariksaan demikian dikatakan sebagai militerisasi keantariksaan yang sifatnya defensif.

### **1.7.2 Luar Angkasa**

Mengacu pada Outer Space Treaty 1967, luar angkasa meliputi bulan dan *celestial bodies*. Lebih lanjut, pada Article II dijelaskan bahwasanya luar angkasa, termasuk di dalamnya bulan dan *celestial bodies*, bukan merupakan wilayah yang dapat diklaim oleh negara tertentu, entah itu melalui okupasi maupun bentuk klaim lainnya, lantaran diakui sebagai *common heritage of mankind*. Akan tetapi, dalam konteks penelitian ini, luar angkasa yang dimaksud lebih mengacu pada wilayah LEO atau orbit terluar bumi, yang berdasarkan Article IV merupakan orbit di sekeliling bumi yang tidak boleh terpenetrasi senjata nuklir atau senjata penghancur massal lainnya, maupun alat transportasi luar angkasa yang mengangkut senjata nuklir. Luar angkasa yang dimaksud di sini tidak dapat dilepaskan dari kawasan *aerospace* yang masih termasuk dalam lingkup kedaulatan nasional, sehingga negara memiliki yurisdiksi atas kawasan udara tersebut. NASA sendiri telah menetapkan kawasan orbit bumi yang masuk dalam yurisdiksi nasional Amerika Serikat, yakni 140.8 km sebagai ketinggian di mana pesawat ulang alik masuk kembali ke ranah bumi setelah melakukan perjalanan ke

luar angkasa (Burke dkk., 2018: 151-2). Penetapan NASA ini yang kemudian menjadi patokan sebagai kawasan ‘luar angkasa’ dalam konteks penelitian ini.

### **1.8 Tipe Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan kerangka berpikir yang diajukan sebelumnya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian preskriptif, karena penelitian tidak hanya menjelaskan proses konstruksi kebijakan pertahanan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump yang menjadi implikasi tren perkembangan astropolitik di negara-negara besar, namun juga menguraikan kebijakan pertahanan apa saja yang dapat diterapkan sebagai instrumen astropolitik Amerika Serikat di mana mendatang.

### **1.9 Ruang Lingkup Penelitian**

Lantaran fokus penelitian ada pada pemerintahan Trump, maka ruang lingkup penelitian ini dimulai dari tahun 2017 terhitung sejak Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (POTUS) dan berakhir pada Agustus 2019. Agustus 2019 menjadi titik akhir penelitian karena pada bulan tersebut kongres Amerika Serikat merilis *Air Force Space Command* sebagai ganti dari *Space Force* yang diajukan oleh Trump.

### **1.10 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan analisis diskursus sebagai teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data seperti *white paper*, pernyataan resmi pemerintah secara verbal maupun tertulis, dan jika perlu menggunakan data sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel daring yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **1.11 Sistematika Pembahasan**

Argumentasi penelitian dibahas melalui pembagian tiga bab berikut. Pada Bab Dua, peneliti secara lebih komprehensif membahas mengenai perkembangan astropolitik di negara-negara besar dan bagaimana presiden Amerika Serikat terdahulu merespon tren perkembangan astropolitik di negara-negara besar seperti Rusia dan Tiongkok. Pada Bab Tiga, pembahasan berfokus pada persepsi pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump terkait perkembangan astropolitik di negara-negara besar terhadap kebijakan pertahanan Amerika Serikat di sektor pertahanan keantariksaan. Bab Empat membahas lebih lanjut mengenai perkembangan militerisasi keantariksaan Amerika Serikat yang tidak hanya memadai bagi upaya defensif, namun juga menunjang upaya ofensif melalui perlindungan aset keantariksaan, pertahanan misil balistik, dan kontrol atas luar angkasa dalam rangka mengembalikan superioritas negara di ranah internasional. Bab Lima memuat kesimpulan dari penelitian, di mana di dalamnya terkandung temuan penting penelitian dan konfirmasi argumentasi penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.